

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu pemerintah daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang harus dipersiapkan adalah kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan potensi daerahnya atau menjadi

daerah tertinggal. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Anggaran pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen - komponen yang terdapat pada anggaran.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang digunakan dalam analisis keuangan terhadap APBD antara lain : rasio kemandirian (otonomi fiskal) untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, rasio efisiensi dan efektivitas untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, rasio keserasian untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, rasio pertumbuhan dan proporsi untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah (Halim,2007: 232).

Analisis terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai keberhasilan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Disamping itu, pengukuran kinerja keuangan daerah juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan lebih baik.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasar Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang intinya, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk urusan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Sebuah daerah otonomi yang memiliki sistem pemerintahan yang baik hendaknya secara berkala melaksanakan pertanggungjawaban kepada publik dan menjadi suatu keharusan yang mutlak dilaksanakan. Pertanggungjawaban merupakan salah satu upaya optimalisasi anggaran untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Asas keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah berarti penggunaan dan pemanfaatan dana milik publik haruslah dilakukan secara adil bagi segenap warga masyarakat tanpa harus memasukan unsur nepotisme, kolusi dan unsur lainnya yang mempengaruhi rasa keadilan masyarakat. Asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan berarti sumber daya yang dikelola hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dalam pengelola keuangan publik harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan kata lain pengelola keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (publik oriented).

Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan otonomi yang luas maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya secara demokratis, adil, merata, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan visi pemerintah Kota Kupang yakni “ terwujudnya masyarakat Kota Kupang yang sejahtera, bermoral, mandiri, dinamis, nyaman, beretos kerja tinggi, berkesadaran hukum, menjunjung sikap gotong royong yang menjiwai semangat persaudaraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola semua potensi di daerah secara optimal.

Potensi daerah yang dimaksud antara lain potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Semua potensi

daerah/sumber daya hendaknya dikelola secara baik dan tanggung jawab. Sejalan dengan bergulirnya reformasi diberbagai aspek/bidang pemerintahan termasuk pemerintahan di daerah menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa artinya penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku umum. Salah satu bagian pemerintahan yang mendapat tanggapan yang luas untuk direformasi adalah sistem pengelolaan keuangan negara (baik ditingkat pusat maupun di daerah) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kemampuan pemerintah Kota Kupang dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Kupang baik langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan.

Berikut ini adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008 – 2011.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah
Kota Kupang Tahun 2008 – 2011

Uraian	APBD Tahun 2008		APBD Tahun 2009		APBD Tahun 2010		APBD Tahun 2011	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN								
PENDAPATN ASLI DAERAH								
Pendapatan Pajak Daerah	8.555.000.000,00	9.946.115.049,00	10.342.245.541,00	11.977.785.476,00	12.173.000.000,00	13.247.651.835,00	20.134.169.000,00	22.200.583.682,00
Pendapatan Retribusi Daerah	8.829.791.000,00	8.898.181.422,00	10.165.896.900,00	9.323.675.310,00	10.940.294.400,00	10.237.262.522,00	12.740.386.490,00	11.267.458.193,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.311.776.905,00	3.284.624.905,00	6.699.300.000,00	4.516.252.840,00	6.721.800.000,00	5.940.394.702,00	8.182.827.850,00	8.015.299.050,51
Lain2 PAD yang Sah	7.195.000.000,00	9.907.792.154,94	6.917.970.000,00	10.387.019.541,02	11.781.742.069,00	7.403.582.395,35	10.442.616.660,00	6.219.586.502,09
Jumlah PAD	27.891.567.905,00	32.036.713.530,94	34.125.412.441,00	36.204.733.167,02	41.616.836.469,00	36.828.891.454,35	51.500.000.000,00	47.702.927.427,60
PENDAPATAN TRANSFER								
Transfer Pemerintah Pusat - Dana								
Dana Bagi Hasil Pajak	21.177.010.000,00	21.992.216.386,00			27.265.092.833,00	29.752.426.464,00	25.648.621.011,00	31.654.498.584,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	354.260.000,00	146.580.583,00			595.708.692,00	196.819.601,00	346.472.647,00	354.403.535,00
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak			17.858.720.922,00	26.391.433.024,00				
Dana Alokasi Umum	313.887.875.000,00	313.887.875.000,00	329.002.227.000,00	329.002.227.000,00	340.862.396.000,00	340.862.396.000,00	377.792.563.000,00	377.570.807.000,00
Dana Alokasi Khusus	38.658.000.000,00	38.658.000.000,00	48.773.000.000,00	48.773.000.000,00	31.014.400.000,00	31.014.400.000,00	40.732.900.000,00	40.731.900.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	374.077.145.000,00	374.684.671.969,00	395.633.947.922,00	404.166.660.024,00	399.737.597.525,00	401.826.042.065,00	444.520.556.658,00	450.311.609.119,00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya								

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-		16.759.798.000,00	24.717.897.500,00	68.513.688.656,00	67.664.238.656,00	93.534.508.240,00	94.401.870.740,00
Jumlah Transfer Pemerintah-Lainya	-		16.759.798.000,00	24.717.897.500,00	68.513.688.656,00	67.664.238.656,00	93.534.508.240,00	94.401.870.740,00
Transfer Pemerintah Propinsi	-			-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.026.205.897,00	7.313.950.542,00	15.730.610.754,00	11.934.289.029,00	14.790.567.182,00	15.591.780.769,00	16.884.730.922,00	16.400.187.548,00
Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	10.026.205.897,00	7.313.950.542,00	15.730.610.754,00	11.934.289.029,00	14.790.567.182,00	15.591.780.769,00	16.884.730.922,00	16.400.187.548,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	384.103.350.897,00	381.998.622.511,00	428.124.356.676,00	440.818.846.553,00	483.041.853.363,00	485.082.061.490,00	554.939.795.820,00	561.113.667.407,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH								
Tunjangan Pendidikan	2.341.814.800,00	2.341.814.800,00						
Pendapatan Bantuan Keu dari Provinsi	1.511.000.000,00	1.511.000.000,00	2.064.750.000,00	1.403.550.000,00		1.389.450.000,00		
Pendapatan Hibah (bantuan keu dari Pusat)						19.552.190.000,00		
Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi)					1.389.450.000,00			
Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat)					19.552.190.000,00			
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.852.814.800,00	3.852.814.800,00	2.064.750.000,00	1.403.550.000,00	20.941.640.000,00	20.941.640.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN	415.847.733.602,00	417.888.150.841,94	464.314.519.117,00	478.427.129.720,02	545.600.329.832,00	542.852.592.944,35	606.439.795.820,00	608.816.594.834,60
BELANJA								
BELANJA OPERASI								
Belanja Pegawai	289.970.367.449,00	259.143.152.057,00	317.314.389.652,00	282.557.851.583,00	363.754.000.376,00	343.754.130.417,00	414.313.144.493,00	391.942.909.965,00
Belanja Barang	78.567.408.649,80	66.122.467.778,00	98.350.043.890,00	89.516.365.411,00	83.391.166.278,00	76.520.282.545,00	91.465.530.639,00	86.674.186.852,00
Belanja Hibah	1.878.590.500,00	1.577.090.500,00	3.745.000.000,00	3.745.000.000,00	6.420.000.000,00	6.019.120.000,00	12.094.375.000,00	11.338.750.000,00

Belanja Bantuan Sosial	21.580.065.000,00	14.356.315.000,00	16.498.999.500,00	15.796.995.359,00	11.067.500.000,00	10.048.443.632,00	12.344.400.000,00	12.272.958.658,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

JUMLAH BELANJA OPERASI	391.996.431.598,80	341.199.025.335,00	435.908.433.042,00	391.616.212.353,00	464.632.666.654,00	436.341.976.594,00	530.217.450.132,00	502.228.805.475,00
BELANJA MODAL								
Belanja Tanah	12.512.500.000,00	12.081.451.830,00	1.542.211.220,00	1.542.211.220,00	6.629.472.250,00	6.629.472.250,00	1.060.000.000,00	973.585.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	19.097.066.700,00	18.039.488.578,00	28.145.332.360,00	21.295.918.535,00	26.034.399.943,00	20.071.029.685,00	22.555.141.940,00	21.297.961.351,00
Belanja Gedung dan Bangunan	13.091.661.000,00	12.330.437.899,00	31.119.610.500,00	25.700.328.460,00	32.338.556.966,00	25.426.668.505,00	25.557.371.519,00	14.239.309.584,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.049.698.000,00	23.419.948.800,00	32.164.341.000,00	27.913.911.342,00	58.442.385.383,00	53.686.496.799,00	52.116.234.009,00	40.454.319.819,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.221.313.000,00	3.206.346.650,00	4.075.128.000,00	3.976.668.600,00	7.456.948.923,00	7.348.921.160,00	4.073.424.469,00	4.045.141.791,00
Belanja Aset Linnya								
JUMLAH BELANJA MODAL	72.972.238.700,00	69.077.673.757,00	97.046.623.080,00	80.429.038.157,00	130.901.763.465,00	113.162.588.399,00	105.362.171.937,00	81.010.317.545,00
Belanja Tidak Terduga								
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	588.869.820,00	1.905.556.727,00	659.854.341,00	500.000.000,00	500.000.000,00	2.671.418.402,00	2.116.748.402,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	588.869.820,00	1.905.556.727,00	659.854.341,00	500.000.000,00	500.000.000,00	2.671.418.402,00	2.116.748.402,00
JUMLAH BELANJA	467.468.670.298,80	410.865.568.912,00	534.860.612.849,00	472.705.104.851,00	596.034.430.119,00	550.004.564.993,00	638.251.040.471,00	585.355.871.422,00
TRANSFER				-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	73.500.000,00	73.500.000,00	113.500.000,00	106.053.800,00	95.930.000,00	95.930.000,00	114.240.000,00	114.240.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemrintah Desa	8.524.870.000,00	8.394.370.000,00	12.109.250.000,00	10.533.500.000,00	8.009.250.000,00	7.184.500.000,00	7.251.400.000,00	7.216.550.000,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			-	-				
JUMLAH TRANSFER	8.598.370.000,00	8.467.870.000,00	12.222.750.000,00	10.639.553.800,00	8.105.180.000,00	7.280.430.000,00	7.365.640.000,00	7.330.790.000,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	476.067.040.298,80	419.333.438.912,00	547.083.362.849,00	483.344.658.651,00	604.139.610.119,00	557.284.994.993,00	645.616.680.471,00	592.686.661.422,00
Surplus (Defisit)	(60.219.306.696,80)	(1.445.288.070,06)	(82.768.843.732,00)	(4.917.528.930,98)	(58.539.280.287,00)	(14.432.402.048,65)	(39.176.884.651,00)	16.129.933.412,60
PEMBIAYAAN								
PENERIMAAN DAERAH			-	-				-
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	98.537.536.473,00	98.401.690.879,00	78.986.668.263,94	75.826.085.275,94	66.432.951.844,00	66.432.951.844,96	46.682.056.260,00	46.185.377.068,51

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.400.000.000,00		9.150.336.846,00	-				
Penerimaan Piutang Daerah	8.134.270.455,00	3.030.265.455,00		724.395.500,00		2.181.506.464,00		3.052.464.392,00
JUMLAH	109.071.806.928,00	101.431.956.334,00	88.137.005.109,94	76.550.480.775,94	66.432.951.844,00	68.614.458.308,96	46.682.056.260,00	49.237.841.460,51
PENGELUARAN DAERAH	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00						
Pembentukan Dana Cadangan								
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Pembiayaan Pokok Utang								
Pemberian Pinjaman Daerah								
JUMLAH	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	88.071.806.928,00	80.431.956.334,00	82.937.005.109,94	71.350.480.775,94	58.932.951.844,00	61.114.458.308,96	39.182.056.260,00	41.737.841.460,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	27.852.500.231,20	78.986.668.263,94	168.161.377,94	66.432.951.844,96	393.671.557,00	46.682.056.260,31	5.171.609,00	57.867.774.873,11

Sumber ; Bagian Keuangan Setda Kota Kupang, 2011

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Anggaran Realisasi Pendapatan dari tahun 2008 – 2011 mengalami peningkatan, hal ini karena target anggaran yang di tetapkan sesuai dengan realisasi pendapatan yang di anggarkan. Untuk Anggaran Realisasi Belanja Daerah tiap tahun terus mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena besarnya realisasi anggaran yang dianggarkan dari rencana pengeluaran. sedangkan untuk Pembiayaan Netto dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain – lain pendapatan yang sah. Belanja Daerah yaitu dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer sedangkan Pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Anggaran realisasi APBD tiap tahun memang berbeda, hal ini di sebabkan oleh karena setiap Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tujuan yang berbeda. Maka setiap potensi untuk mengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan untuk menghitung anggaran suatu daerah harus sesuai dengan standar masing – masing dan dapat dipakai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan demikian maka akan terciptanya anggaran daerah yang lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008 - 2011.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah

“Bagaimana Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008 – 2011. ” ?

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008 – 2011.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- 1) Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang, sebagai masukan informasi untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang secara lebih efektif dan efisien.
- 2) Bagi pembaca pada umumnya, sebagai bacaan yang berguna untuk memperluas wawasan tentang keuangan daerah khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
- 3) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.